

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Tinjauan Literatur

Pada bab kajian pustaka ini, peneliti menggunakan beberapa sumber yang telah ditelaah terlebih dahulu sebagai pedoman dan pembanding penelitian yang akan penulis ambil. Penulis berusaha mengumpulkan data-data dari penelitian terdahulu yang relevan dengan topik yang sedang diteliti.

Dengan begitu, hal ini diperlukan sebagai tinjauan literatur untuk mengelaborasi tentang pandangan, teori, temuan atau penelitian terdahulu dari jurnal ilmiah.

**Tabel 2.1 Tinjauan Literatur**

No	Judul	Penulis	Persamaan	Perbedaan
1	<i>Exploring Gender and Climate Change Nexus, and Empowering Women in the South Western Coastal Region of Bangladesh for Adaptation and Mitigation</i>	Md Ashrafuzzaman, Carla Gomes, João Miguel Dias dan Artemi Cerdà	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penelitian ini memiliki persamaan penelitian tentang perubahan iklim dan dampaknya terhadap kerentanan perempuan.</li> <li>• Penelitian menunjukkan bahwa bencana alam yang berbeda berkontribusi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penelitian ini berfokus mengumpulkan data-data mengenai kerentanan perempuan dengan datang langsung kelapangan dengan</li> </ul>

---

			<p>pada pengurangan sumber pendapatan, terutama perempuan. Selama masa bencana, perempuan tidak dapat menemukan pekerjaan berbasis pertanian karena bencana alam merusak produksi tanaman</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemberdayaan mereka melalui keterlibatan dalam pengambilan keputusan, dipandang sebagai respons yang lebih efektif terhadap dampak perubahan iklim, serta berkontribusi pada transformasi sosial melalui diskusi publik</li> </ul>	<p>pengambilan sampel</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menggunakan teknik pengumpulan kuantitatif</li> </ul>
--	--	--	---	--

---

<p><b>2</b> <i>Approaches to Economic Empowerment of Rural Women for Climate Change Mitigation and Adaptation: Implications for Policy.</i></p>	<p>EN Ajani, EA Onwubuya, RN Mgbenka</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penelitian ini meneliti tentang adanya pemberdayaan perempuan di negara berkembang</li> <li>• Memakai konsep pemberdayaan kepada perempuan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penelitian ini sama-sama membahas tentang perubahan iklim dan perempuan di negara berkembang, tetapi pada jurnal ini tidak ada negara yang</li> </ul>
---	--	--	--

---

---

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perempuan secara konsisten kurang terwakili dalam kebijakan dan proses pengambilan keputusan seputar perubahan iklim</li> <li>• Perubahan iklim dan perempuan menjadi fokus utama dalam penelitian ini.</li> </ul>	<p>spesifik dibahas. Sedangkan yang penulis ingin teliti adalah negara di Bangladesh</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penelitian ini melihat dari peran organisasi lain yaitu United Nations Population Fund, sedangkan yang ingin diteliti oleh penulis adalah kerjasama dari UN Women dan UNEP.</li> </ul>
<p>3 <i>Gender Integration in Climate Change and Agricultural Policies: The Case of Nepal</i></p>	<p>Bimala Rai Paudyal, Nitya Chanana, Arun Khatri-Chhetri, Lakpa Sherpa, Ishwori Kadariya, Pramod Aggarwal</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penelitian ini mempunyai latar belakang yang sama, yaitu membahas tentang kerentanan iklim dan partisipasi perempuan yang diperlukan dalam mengatasi perubahan iklim.</li> <li>• Menggunakan metode kuantitatif dengan melalui</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fokus pada penelitian ini adalah negara Nepal. Sedangkan yang penulis teliti merupakan negara Bangladesh.</li> <li>• Penelitian ini meneliti terhadap analisis dari kebijakan pemerintahan di Nepal</li> </ul>

---

---

		<p>survei terhadap 503 rumah tangga dan lima diskusi kelompok terarah</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Membahas mengenai partisipasi petani perempuan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melihat dari konsep gender dalam perubahan iklim di Nepal.</li> </ul>
<p>4 <i>The Influence of Gender Relations on Women's Involvement and Experience in Climate Change Adaptation Programs in Bangladesh</i></p>	<p>Mumita Tanjeela dan Shannon Rutherford</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perubahan iklim termanifestasi dari berbagai peristiwa cuaca dan bahaya iklim di Bangladesh, hal ini menciptakan kerentanan yang meningkatkan bagi banyak orang.</li> <li>• Penduduk Bangladesh yang tinggal di pedesaan adalah penggerak utama ekonomi berbasis pertanian, oleh karena itu perubahan iklim secara langsung dan tidak langsung mempengaruhi kehidupan terutama pada populasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penelitian ini sama-sama meneliti tentang perubahan iklim dan perempuan, hanya saja penelitian ini lebih fokus kedalam peran individu atau kelompok perempuan dan mengungkapkan pengaruh mereka yang signifikan dalam praktek adaptasi perubahan iklim. Sedangkan penulis memfokuskan penelitian pada kontribusi dari organisasi internasional dalam memainkan</li> </ul>

---

---

			perempuan yang lebih banyak.	perannya melalui program untuk pemberdayaan perempuan akibat dari perubahan iklim.
				<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penelitian Ini menggunakan teori <i>Feminist Political Ecology, Feminist Environment</i> dan <i>Ecofeminism</i>.</li> </ul>
5	<i>Gender Equality and Women's Empowerment in Climate Change Adaptation and Disaster Risk Reduction-Laws, Policies and Practices in Vietnam.</i>	Vu Ngoc Binh	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perubahan iklim diperkirakan bahwa situasi akan memburuk dan berdampak pada mata pencaharian masyarakat disebuah negara, dampaknya akan signifikan kepada perempuan.</li> <li>• Penelitian ini sama-sama meneliti tentang pemberdayaan perempuan akibat dari dampak perubahan iklim.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adanya perbedaan negara yang diteliti. Penelitian ini mengambil negara Vietnam, sedangkan penulis fokus pada negara Bangladesh sebagai negara yang sedang menghadapi dampak dari perubahan iklim.</li> </ul>

---

Literatur pertama adalah penelitian yang ditulis oleh MdAshrafuzzaman, Carla Gomes<sup>2</sup>, João Miguel Dias dan Artemi Cerdà dengan judul *“Exploring Gender and Climate Change Nexus, and Empowering Women in The South*

*Western Coastal Region of Bangladesh for Adaptation and Mitigation*” Dalam penelitian tersebut, peneliti berpendapat bahwa perempuan paling terpengaruh oleh perubahan iklim dan bencana alam. Kondisi seperti kekurangan air dan makanan, jarak dari rumah ke tempat perlindungan siklon, tidak adanya partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan, pengaturan fisik dan sosial yang tidak menguntungkan bagi perempuan, kemiskinan, sumber daya yang terbatas, dan kehilangan rumah membuat perempuan rentan di Bangladesh. Bahkan dalam kondisi yang tidak menguntungkan seperti itu, perempuan mampu bekerja dengan pertanian dan pengumpulan air, yang berkontribusi pada mata pencaharian masyarakat (Md et al., 2022).

Untuk menerapkan kebijakan dari agen maka harus lebih fokus dan prioritas. Sementara pembuat kebijakan nasional perlu mempertimbangkan manfaat, biaya, dan potensi kerugian dari inisiatif baru, mereka menghadapi kegagalan dalam mencapai hasil yang berarti atau diinginkan melalui proses ini (Md et al., 2022). Penulis menjadikan data-data yang disajikan sebagai pedoman penelitian dalam meneliti dampak perubahan iklim, kerentanan perempuan dan beberapa kebijakan yang berlaku di Bangladesh. Penulis melihat adanya perluasan kebebasan sosial dan ekonomi perempuan, termasuk pemberdayaan mereka melalui keterlibatan dalam pengambilan keputusan, dipandang sebagai respons yang lebih efektif terhadap dampak perubahan iklim, serta berkontribusi pada transformasi sosial melalui diskusi publik.

Literatur kedua adalah penelitian yang ditulis oleh EN Ajani, EA Onwubuya, dan RN Mgbenka dengan judul *“Approaches to Economic Empowerment of Rural Women for Climate Change Mitigation and Adaptation: Implication for Policy”* Dalam penelitian ini, peneliti mengatakan bahwa ada beberapa cara untuk mempromosikan partisipasi ekonomi perempuan

sekaligus mencegah adanya perubahan iklim. Salah satu pendekatan di bidang mitigasi iklim adalah promosi energi terbarukan yang membantu menghindari emisi gas rumah kaca. Potensi perempuan pedesaan sebagai agen perubahan untuk mitigasi dan adaptasi iklim masih belum dimanfaatkan. Pengetahuan teoretis dan praktis mereka yang luas tentang konservasi lingkungan dan sumber daya tidak dipertimbangkan dengan baik (Ajani et al., 2013).

Dalam hal partisipasi ekonomi, mereka tidak dibayar untuk jasa lingkungan yang telah mereka berikan. Kontribusi potensial perempuan pedesaan untuk mitigasi iklim dengan menjadi bagian dari siklus ekonomi tidak dimanfaatkan secara memadai. Pemberdayaan ekonomi perempuan melalui mitigasi dan adaptasi iklim mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan sosial ekonomi, mengurangi kemiskinan, mengendalikan masalah lingkungan, dan meningkatkan potensi adaptasi, yang bermanfaat bagi perempuan dan laki-laki. Studi ini merekomendasikan agar langkah-langkah untuk mempromosikan partisipasi ekonomi perempuan dapat diintegrasikan ke dalam inisiatif mitigasi dan adaptasi iklim. Agar dapat memainkan peran ekonomi, diperlukan kerangka kelembagaan, hukum dan politik yang memudahkan perempuan untuk bertahan (Ajani et al., 2013)

Penulis melihat bahwa adanya langkah-langkah pendekatan pemberdayaan terhadap perempuan menciptakan sinergi timbal balik dalam upaya pengentasan kemiskinan dan pembangunan. Selain itu kebijakan adaptasi maupun mitigasi perlu menyertakan strategi untuk meningkatkan perlindungan sosial, pengembangan usaha dan penciptaan lapangan kerja di kalangan perempuan pedesaan. Hal ini dapat menjadi sebuah ide atau konsep untuk penulis dalam penelitian yang diteliti melihat konsep dari perubahan iklim yang sedang dibahas.

Literatur ketiga, merupakan penelitian yang ditulis oleh Bimala Rai Paudyal, Nitya Chanana, Arun Khatri-Chhetri, Lakpa Sherpa, Ishwori Kadariya, dan Pramod Aggarwal dengan judul penelitian “*Gender Intergration in Climate Change and Agriculture Policies: The Case of Nepal*” Penelitian ini membahas bahwa Integrasi gender di seluruh proses kebijakan nasional sangat penting untuk memastikan implementasi yang efektif dari intervensi adaptasi perubahan iklim di bidang pertanian. Hal ini juga dalam kerentanan iklim, partisipasi perempuan sangat dibutuhkan. Penelitian ini menyoroti kesenjangan kebijakan dalam menyarankan serangkaian rekomendasi untuk meningkatkan tanggap gender pada tingkat kebijakan di Nepal. Ini menyajikan kesenjangan gender yang dihadapi perempuan di bidang pertanian. Oleh karena itu, rencana dan program kebijakan perlu menggabungkan kombinasi pendekatan untuk menjangkau (partisipasi, suara, dan agensi mereka), manfaat (dengan akses ke aset dan peluang mata pencaharian) dan memberdayakan perempuan (Paudyal et al., 2019)

Analisis kebijakan ini memunculkan kesenjangan yang ada dalam hal pengakuan dan penyediaan terkait pertanian dan perubahan iklim. Disini peneliti mengatakan dengan adanya rekomendasi yang diberikan tidak hanya perlu mengintegrasikan gender dalam semua ketentuan, tetapi juga mengklasifikasikan dan memastikan keseimbangan yang cermat agar memungkinkan jangkauan dan partisipasi perempuan. Dengan demikian keterwakilan perempuan dan membangun kapasitas mereka untuk berpartisipasi secara efektif dalam posisi pembuatan kebijakan utama, terutama yang terkait dengan pertanian dan perubahan iklim, dapat memainkan peran penting dalam mengatasi kesenjangan kebijakan (Paudyal et al., 2019)

Penulis mendapatkan gambaran lain melalui analisis kebijakan pemerintahan. Penelitian ini menjelaskan bahwa meskipun gender diakui dalam sebagian besar kebijakan, sebagai bidang yang membutuhkan perhatian, ruang lingkup intervensi sebagian besar terbatas pada peningkatan jangkauan dan partisipasi petani perempuan dalam implementasi kebijakan tersebut. Di lain sisi penulis dapat menyimpulkan persamaan yang diteliti mengenai peran perempuan dalam partisipasi sebuah program atau kebijakan.

Literatur keempat merupakan jurnal penelitian yang ditulis oleh Mumita Tanjeela dan Shannon Rutherford dengan judul *“The Influence of Gender Relations on Women’s Involvement and Experience in Climate Change Adaptation Programs in Bangladesh”*. Penelitian ini menjelaskan bahwa hubungan antara kemiskinan dan perubahan iklim merupakan keprihatinan utama, terutama di negara seperti Bangladesh yang kekurangan sumber daya adalah masalah signifikan yang terjadi di daerah pedesaan dan perkotaan. Perubahan iklim mempengaruhi demografi penduduk di Bangladesh, perempuan lebih rentan terhadap dampak perubahan iklim, sebagaimana fakta dari sejarah bencana akibat iklim di Bangladesh. Perubahan iklim meningkatkan kerentanan sosial ekonomi terhadap perempuan dengan berdampak langsung terhadap ketahanan pangan keluarga mereka, konsumsi air, dan mata pencaharian (Tanjeela & Rutherford, 2018).

Oleh karena itu, peran dan kontribusi mereka sangat penting dalam menanggapi melalui adaptasi. Meskipun demikian, di Bangladesh, tantangan tetap menyertai wanita sebagai aktor yang berbeda dan agen aktif dalam program adaptasi iklim mengingat dinamika kekuasaan gender yang ada (Tanjeela & Rutherford, 2018). Dalam hal ini penulis dapat melihat adanya perbedaan fokus pada aktor yang diteliti walaupun sama-sama membahas tentang perubahan iklim.

Penulis meneliti tentang kontribusi dari organisasi internasional yang berperan sebagai penggerak melalui program-program yang diberikan di Bangladesh, sedangkan dalam penelitian ini berfokus pada kontribusi individu sebagai aktor aktif untuk dirinya sendiri.

Literatur yang terakhir adalah jurnal penelitian yang ditulis oleh Vu Ngoc Binh dengan judul *“Gender Equality and Women’s Empowerment in Climate Change Adaptation and Disaster Risk Reduction-Law, Policies, and Practice in Vietnam”*. Pada penelitian ini membahas bahwa Vietnam menghadapi tantangan baru, termasuk pertumbuhan ekonomi yang melambat, ketidakstabilan ekonomi makro, bentuk baru kemiskinan dan kerentanan, serta meningkatnya ketimpangan. Tekanan alam dan iklim meningkat, dan negara ini menghadapi peningkatan pesat dalam permintaan energi, emisi gas rumah kaca, serta polusi dan biaya terkait. Pembangunan berkelanjutan dan respons efektif terhadap perubahan iklim memerlukan upaya untuk mengurangi degradasi lingkungan, bersama dengan peningkatan produksi ramah lingkungan dan promosi model bisnis yang hemat energi dan berkelanjutan. Penegakan hukum perlindungan lingkungan yang efektif, bersama dengan manajemen risiko bencana dan upaya pengurangan yang membangun ketahanan terhadap tekanan dan bahaya lingkungan, juga diperlukan (Ngoc Binh, 2019)

Ada risiko nyata bahwa efek perubahan iklim akan memperlambat kemajuan SDG di Vietnam. Hambatan terhadap partisipasi perempuan ini perlu diatasi karena perubahan iklim menciptakan tekanan baru pada sumberdaya dan mata pencaharian (Ngoc Binh, 2019) Disini penulis melihat bahwa partisipasi perempuan untuk suatu pemberdayaan melalui adaptasi dari kebijakan sangatlah penting dan berpengaruh terhadap keseimbangan negara. Penulis mengetahui

persamaan terhadap penelitian mengenai perubahan iklim dan perempuan, dengan adanya data-data yang disajikan dalam penelitian ini, penulis akan lebih mengembangkan dan dapat membandingkan antara negara Bangladesh dengan Vietnam sebagai acuan.

## **2.2 Kerangka Teoritis/Konseptual**

Kerangka teoritis atau konseptual adalah konsep berfikir untuk mempermudah penulis dalam menemukan jawaban dari penelitian. Dengan adanya konseptual maka akan memperkuat suatu Analisa penelitian. Hal ini berfungsi sebagai argumentasi untuk menjawab pertanyaan penelitian serta sebagai landasan dalam menganalisis suatu masalah yang akan diteliti. Maka penulis akan menggunakan teori-teori yang berhubungan dengan masalah penelitian sebagai saran untuk membentuk pengertian sebagai pedoman objek penelitian.

### **2.2.1 *Global Governance***

Tidak semua konflik dapat diselesaikan oleh negara berdaulat yang bertindak sendiri. Hal ini, bukan hanya membutuhkan aktor antar negara saja melainkan peran aktif dari aktor non-negara yang berdampak pada keaktifan partisipasi dari masyarakat sipil. Beberapa peneliti menuntut pembentukan mekanisme internasional baru demi pemantauan atau negosiasi aturan internasional baru yang sebagian besar membutuhkan penyempurnaan cara untuk mengamankan kepatuhan negara dan aktor lainnya. Terkadang istilah pemerintahan global atau tata kelola global telah digunakan sebagai sinonim untuk organisasi internasional. Namun, hal ini lebih sering digunakan untuk menangkap

kompleksitas dan dinamisme dari banyak upaya kolektif oleh aktor non negara untuk mengidentifikasi, memahami, dan mengatasi berbagai isu dan masalah saat ini. Dapat dikatakan bahwa tata kelola global bukanlah pemerintahan global, satu tatanan dunia, maupun struktur otoritas hierarkis dari atas ke bawah, tetapi kekuasaan, dan otoritas dalam pemerintahan global yang hadir dalam berbagai cara dan derajat yang berbeda-beda (Karns et al., 2015).

Kompleksitas dari *Global Governance* bukan hanya fungsi dari banyak bentuknya, tetapi juga dari banyak aktornya (Multilateral Forum). Negara merupakan aktor sentral dalam IGO dan dalam banyak bentuk pemerintahan global lainnya. Sedangkan, *civil societies*, media, MNC'S, *private military*, *security companies* adalah dari beberapa banyaknya aktor non-negara. Hal ini dapat disimpulkan bahwa adanya perspektif multiaktor pada politik dunia (Karns et al., 2015).

*Intergovernmental organization* (IGO) mencakup setidaknya tiga negara bagian sebagai anggota, yang memiliki kegiatan di beberapa negara bagian, dan dibuat melalui perjanjian antar pemerintah formal seperti piagam, atau undang-undang. (Mathhiason, 2007) mengatakan bahwa IGO diakui sebagai subjek hukum internasional, dengan kedudukan terpisah dari negara anggotanya. IGO dibentuk oleh negara, dan negara memberikan tanggung jawab dan wewenang kepada IGO untuk bertindak. Namun, berbeda dengan PBB yang dipandang sebagai aktor dengan hak mereka sendiri, karena memiliki anggota sekretariat. Hal ini dimaksudkan bahwa PBB memainkan peran kunci tetapi tidak dalam mengatur negara untuk bertindak. Hanya saja perannya mengoordinasikan upaya kelompok yang berbeda, memberikan keterampilan diplomatik untuk mengamankan kesepakatan, dan memastikan efektivitas program (Karns et al.,

2015).

Studi kasus dalam penelitian ini, Bangladesh membutuhkan peran serta dukungan dari IGO untuk menangani perubahan iklim yang berdampak terhadap perempuan di Bangladesh. Pada tahun 2010, dalam upaya untuk meningkatkan efektivitas program-program perempuan telah dibentuk seperti, *UN Women* untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, yang merupakan penggabungan dari berbagai bagian PBB. Hal Ini menyatukan dimensi hak asasi dalam berpolitik, pemberdayaan perempuan, membantu badan-badan PBB merumuskan kebijakan dan standar, memberi saran kepada negara dengan dukungan teknis maupun keuangan, dan memantau kemajuan sebuah negara. Selain itu dengan adanya Program Lingkungan PBB (UNEP), hal ini bertujuan untuk mensintesis keadaan dan pengetahuan tentang perubahan iklim, juga merekomendasikan tanggapan yang memungkinkan (Karns et al., 2015).

Dalam Program EmPower yang diprakarsai oleh *UN Women* dan UNEP yang bekerja sama dengan pemerintahan lokal di Bangladesh dalam meningkatkan keterlibatan partisipasi dari CSO'S dengan program yang diberikan. Hal ini menunjukkan adanya bidang reformasi lain dengan mengintegrasikan aktor non negara ke dalam sistem PBB dengan lebih baik (Karns et al., 2015). UN women sebagai pendukung yang bekerjasama dengan pemimpin perempuan untuk meningkatkan partisipasi para perempuan dalam pemberdayaan melalui *training*, *campaign*, *web binar* dan sebagainya. Sedangkan, peran UNEP sebagai wadah dalam pengimplementasian program dari pembaruan energi sebagai adaptasi mengurangi dampak perubahan iklim yang terjadi di Bangladesh.

Pemerintah perlu melibatkan sektor non-pemerintah baik untuk membuat keputusan yang terinformasi dan mengimplementasikan keputusan-keputusan

yang dibuat. Dengan demikian, Organisasi masyarakat sipil atau *civil society organization* (CSO) secara bertahap berkembang dari pengamat menjadi kritikus pemerintah berbagai mekanisme tata kelola pemerintahan. Peran CSO tidak hanya untuk menjadi pendukung eksternal, tetapi semakin banyak untuk menjadi bagian integral dari tata kelola global. (United Nations, 2013). Dengan adanya CSO yang terlibat di Bangladesh, maka hal ini merupakan kunci dalam mengimplementasikan tujuan program yang diberikan oleh UN Women dan UNEP sebagai menyelesaikan masalah perubahan iklim yang ada di Bangladesh.

### **2.2.2 Liberal Feminism**

Dalam buku yang berjudul “*A Vindication of the Rights of Women*” oleh Mary Wollstonecraft yang berpendapat atas rasionalitas, hukum kodrat dan keselarasan adalah hak laki-laki maupun perempuan. Pemikiran ini adalah pendapat pertama mengenai *Liberal Feminism* di Inggris. Wollstonecraft mengatakan bahwa hak dan kesempatan laki-laki dan perempuan mempunyai kesamaan yang rata. Menurutnya, jika hak dan kesempatan diberikan kepada perempuan, maka mereka akan terlepas dari bergantungnya ekonomi pada kaum laki-laki sehingga dapat menghindarkan adanya kemiskinan pada kaum perempuan. Selain itu dari buku ini, Wollstonecraft membahas penindasan terhadap wanita dan penolakan terhadap kemampuan sosial mereka dengan isu-isu terkait yang masih beresonansi dalam gerakan emansipasi wanita (Wollstonecraft, 2018)

Feminisme liberal berpendapat bahwa sebuah penindasan terhadap para perempuan ada karena perempuan belum dapat melakukan haknya sebagai makhluk yang rasional dan bebas. Kebebasan datang dari akal dan pemisahan

antara dunia privat, publik, peluang dan hak perempuan. Feminisme liberal yang mengangkat isu-isu sosial berupaya mendorong persamaan kesempatan dan hak yang sama bagi semua orang, termasuk hak dan kesempatan perempuan. Kesempatan dan hak yang sama antara perempuan dan laki-laki adalah penting, sehingga kesempatan antara laki-laki dan perempuan tidak perlu dibedakan (Anggana Abhirama et al., 2022)

Pada abad ke-19, mereka memperjuangkan kebebasan mendasar seperti hak wanita untuk memiliki properti dan untuk memilih. Di abad ke-20, para feminis liberal telah menentang hukum yang tidak memperkenankan wanita dalam bekerja dan diberikan upah. Selain menentang undang-undang yang menetapkan berbagai hak bagi wanita dan bagi pria, kaum feminis liberal juga mempromosikan undang-undang yang sebenarnya melarang berbagai jenis diskriminasi terhadap wanita. Perundang-undangan seperti itu menuntut agar wanita sama-sama memenuhi syarat dengan pria. Hal ini bertujuan agar mereka setara dalam pekerjaan, bahwa mereka harus memiliki akses yang sama terhadap program pelatihan kerja dan pekerjaan, dan bahwa mereka harus memiliki kesempatan pendidikan dasar yang sama (Jaggar, 1983).

Teori *liberal feminism* berjuang dengan bagaimana perempuan memiliki kewajiban untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Mereka berpendapat bahwa keterbelakangan perempuan adalah bagian dari ekonomi. Mereka datang dengan sebuah konsep, yaitu konsep yang melibatkan perempuan, yang disebut sebagai perempuan dalam pembangunan, dan bertahan karena menganggap perempuan dianggap sebagai masalah dalam perekonomian saat ini. Menurutnya, salah satu penyebab ketertinggalan perempuan adalah ketidak mampuan mereka untuk berpartisipasi dalam politik atau pembangunan. Hal ini menyebabkan mereka

melibatkan perempuan dalam proses sosial ekonomi dan program pembangunan sebagai cara untuk memberdayakan perempuan (Anggana Abhirama et al., 2022)

Ada dua cara untuk mencapai feminisme liberal, yang pertama adalah dengan membangkitkan kesadaran psikologis, termasuk membahas pengalaman perempuan dalam masyarakat. Kedua, adanya reformasi hukum yang dapat menguntungkan perempuan. Perubahan peraturan ini merupakan peraturan baru yang memperhatikan perempuan dan laki-laki, yaitu hidup bersama atas dasar kesetaraan. Feminis liberal juga berpendapat bahwa sistem hukum perempuan terkadang mengarah pada marginalisasi perempuan, dan oleh karena itu kesetaraan hanya dapat dicapai jika sistem hukum tidak terlalu bias terhadap perempuan. Inti dari teori feminis liberal ini adalah untuk memastikan bahwa perempuan juga memiliki hak yang sama dengan laki-laki (Anggana Abhirama et al., 2022)

Untuk mewujudkan pencapaian dan hak bagi perempuan di Bangladesh, menyadarkan kesadaran psikologis akan pentingnya partisipasi dalam pemberdayaan perempuan melalui pelatihan, kampanye, dan memberikan suara mereka kepada pemerintahan adalah suatu pencapaian dalam bentuk norma yang baru. Pemberdayaan adalah proses berkelanjutan yang berpusat pada komunitas lokal, melibatkan rasa saling menghormati, refleksi kritis, kepedulian, dan partisipasi kelompok, di mana orang-orang yang tidak memiliki bagian yang sama dari sumber daya berharga. Pemberdayaan dapat dilihat sebagai proses di mana individu belajar untuk melihat hubungan yang lebih dekat antara tujuan mereka dan rasa bagaimana mencapainya, dan hubungan antara usaha mereka dan hasil kehidupan. Definisi konseptual ini juga menunjukkan bahwa partisipasi dengan orang lain untuk mencapai tujuan, upaya untuk mendapatkan akses ke sumber

daya, dan beberapa pemahaman kritis tentang lingkungan sosiopolitik merupakan komponen dasar dari konstruksi tersebut (Zimmerman, 2000).

Kesadaran akan peran perempuan mulai tumbuh dan tercermin dalam pendekatan Program Pemberdayaan Perempuan. Didasarkan pada satu pemikiran bahwa perempuan perlu hidup mandiri agar pembangunan dapat dirasakan oleh semua pihak. Perempuan merupakan sumber daya manusia yang tidak ternilai harganya, maka posisinya di ikut sertakan dalam pemberdayaan (Hikmah, 2015). Selain itu dengan adanya Program *EmPower* maka adanya keterlibatan para perempuan di Bangladesh untuk mengambil langkah dalam pengimplementasian kebijakan yang ada dalam pemerintahan Bangladesh. Perempuan adalah salah satu contoh kelompok rentan atau terpinggirkan yang memerlukan pemberdayaan dalam mengangkat status mereka melalui pendidikan, penyadaran, literasi, dan pelatihan. Pemberdayaan perempuan dapat melengkapi dan memungkinkan perempuan untuk mengambil suatu keputusan untuk menentukan hidup mereka. Mereka mungkin mendapat kesempatan untuk mendefinisikan kembali gilirannya memberi lebih banyak kebebasan untuk mengejar tujuan yang diinginkan (Mahbub, 2021).

Program *EmPower* yang diberikan ini telah berjalan dengan sesuai konsep dari teori feminisme liberal, hal ini dapat membuat perempuan pedesaan yang ada di Bangladesh sadar bahwa mereka memiliki hak dan kesempatan yang sama seperti laki-laki. Para pemimpin CSO perempuan menginspirasi para perempuan pedesaan dengan mendirikan sebuah organisasi yang akan membantu mengangkat suara para wanita yang berjuang dengan dampak negatif dari perubahan iklim. Dapat diketahui bahwa dengan adanya partisipasi yang kuat maka akan melibatkan kerjasama yang lebih baik antara masyarakat sipil dan pemerintah.

### 2.2.3 Perubahan Iklim

Perubahan iklim adalah perubahan pada keadaan iklim yang dapat diidentifikasi oleh perubahan rata-rata atau variabilitas yang sifatnya bertahan untuk waktu yang lama, biasanya puluhan tahun atau lebih. Kondisi iklim berbeda dengan kondisi cuaca, cuaca hanya menggambarkan kondisi dalam jangka pendek dari variable-variabel kurun waktu tertentu. Perubahan iklim merupakan statistik cuaca yang biasanya interval selama 30 tahun. Hal ini diukur dengan menguji pola variasi suhu, kelembaban, tekanan atmosfer, angin, curah hujan, jumlah partikel atmosfer, dan variabel meteorologi lainnya di suatu wilayah dalam jangka waktu yang lama (Agba et al., 2017)

Pengertian perubahan iklim menurut *Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)* mengacu pada perubahan yang dapat diidentifikasi melalui uji statistik dengan perubahan mean atau variabilitas propertinya dan hal ini berlangsung dalam kurun waktu yang lama. IPCC mengatakan hal ini merupakan proses internal alami atau eksternal (siklus matahari, letusan gunung berapi, perubahan antropogenik) yang secara terus menerus dalam komposisi penggunaan lahan (Matthews, 2018). Sedangkan *United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)* berpendapat antara perubahan iklim yang disebabkan oleh aktivitas manusia yang mengubah komposisi atmosfer dan variabilitas iklim yang disebabkan oleh sebab-sebab alami (UNFCCC, n.d.)



Gambar 2.1 Faktor dan dampak perubahan iklim, sumber: (Finaka, 2016)

Kerusakan lapisan ozon, kerusakan fungsi hutan, penggunaan clorofluorocarbon, gas dari industri merupakan contoh dari faktor perubahan iklim yang dirasakan di bumi. Pemanasan global merupakan membuat proses dimana suhu rata-rata permukaan bumi meningkat, hal ini disebabkan oleh pancaran sinar matahari ke atmosfer bumi yang kemudiandiubah menjadi energi panas berupa sinar infra merah yang diserap oleh udara (Finaka, 2016) Pemanasan global menyebabkan efek rumah kaca, dimana sebagian panas yang diserap oleh permukaan bumi menghangatkanplanet dan sebagian lagi dipantulkan kembali ke angkasa. Akumulasi gas rumah kaca seperti uap air, karbon dioksida dan metana di atmosfer menyebabkan sebagian panas tetap berada di atmosfer bumi dalam bentuk radiasi infra merah (Utina, 2015)

Penumpukan gas pada rumah kaca telah menyebabkan peningkatan suhu global dan pencairan es di bumi, kekeringan yang lebih lama menjadikemarau, curah hujan tinggi, kenaikan permukaan laut, peningkatan bencana seperti banjir, tanah longsor, dan gelombang badai (Finaka, 2016).Perubahan ini akan memiliki efek langsung terhadap kehidupan manusia seperti paparan cuaca ekstrim, sedangkan efek tidak langsung mengakibatkan penularan penyakit, adanya

penurunan hasil produksi pangan, penurunan akses air tawar, dan hilang keanekaragaman hayati (Alston, 2015)

Bangladesh merupakan negara yang sangat dipengaruhi oleh adanya perubahan iklim. Meningkatkan kesadaran adalah inisiatif pertama dan utama dari dorongan nasional terhadap perubahan iklim dengan fokus pada adaptasi daripada mitigasi. Program penyadaran ditemukan dalam kelompok masyarakat sipil, organisasi internasional maupun NGO's, hal ini tidak dilihat sebagai kebijakan atau program pemerintah. Pemerintah telah merumuskan dua dokumen penting seperti Komprehensif. Bangladesh menghasilkan jumlah emisi karbon yang sangat kecil sekarang. Namun, permintaan konsumsi energi semakin meningkat seiring dengan tren peningkatan pembangunan ekonomi. Untuk menjamin ketahanan energi, pemerintah mendorong lebih banyak produksi energi dan pemanfaatan sumber energi konvensional. Selain itu, pentingnya juga diberikan pada jalur hijau pesisir, reboisasi sosial dan energi terbarukan seperti panel surya, dan pembangkit biogas untuk strategi adaptasi dan mitigasi (Fazlul Hoque, 2017)

Energi terbarukan dapat dimanfaatkan sebagai sumber alternatif untuk menjawab tantangan ketahanan energi. Dalam program EmPower "Women for Climate Resilient Societies" UN Women bekerja sama dengan UNEP dalam pembaruan energi sebagai adaptasi mengurangi dampak perubahan iklim yang terjadi di Bangladesh.

### **2.3. Asumsi Penelitian**

Asumsi penelitian merupakan sesuatu yang diyakini kebenaran oleh penulis dalam melaksanakan penelitian, hal ini juga penentuan dalam merumuskan

hipotesis sementara dalam Penelitian. Maka dengan data-data yang diberikan oleh penulis dalam Penelitian ini, penulis merumuskan asumsi penelitian bahwa kerjasama antara UN-Women dan UNEP melalui program *EmPower “Women For Climate Resilient Societies”* akan berhasil untuk mendukung perempuan di Bangladesh agar dapat diberdayakan secara sosial, ekonomi, serta pendidikan dalam kegiatan penanganan perubahan iklim. Program ini dapat berhasil dengan keikutsertaan peran perempuan maupun organisasi masyarakat sipil yang terlibat dalam kegiatan *renewable energy* (Energi terbarukan) dan latihan yang diadakan. Hal ini yang akan mampu membuat perempuan akhirnya dapat meningkatkan ketangapan dalam kebijakan pengurangan risiko iklim dan bencana, Memungkinkan perempuan untuk menggunakan energi terbarukan sebagai sumber daya ekonomi untuk mata pencaharian dan meningkatkan mekanisme.

## 2.4. Kerangka Analisis

